

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Atmadja, Arifin P. Soeria, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010
- Atmadja, Arifin soeria, *Kompendium Hukum Bidang Keuangan Negara (sumber-sumber keuangan negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012
- Handoko, T Hani, *manajemen edisi kedua*, balai penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984
- Hidjaz, Kamal, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar
- Huda, Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Gadjong, Agussalim Andi, *Pemerintahan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Mamesah, D.J, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, edisi revisi, cetakan ketujuh, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta
- Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandarlampung, 2009
- Rahayu ,Ani Sri, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- Rencana Stratejik (RENSTRA) tahun 2010-2014, Inspektorat Provinsi Lampung
- Sabarno, Harl, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sutedi, Arian, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Sutedi ,Adrian, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Sinar Grafika, jakarta. 2009

Tjandra , Dr. W. Riawan, Hukum Keuangan Negara, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2013

Trisnawati, Sule Erni, dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit Prenada Media Jakarta, 2005

Opini Media Massa/ artikel

Harian Radar Lampung Minggu Tanggal 2 Maret 2014

Peraturan perundang-undangan

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No 1 Tahun 2004 tentang Prebendaharaan Negara

UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Keputusan Presiden No 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Keputusan Menteri No 41 Tahun 2001 tentang pengawasan Represif kebijakan daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung,

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung,

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Internet

<http://inspektorat.kulonprogokab.go.id/index.php?pilih=hal&id=19>, Diakses Tanggal 24 maret